

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT UNI EROPA DALAM USAHA  
PERBAIKAN EKONOMI DAN POLITIK DI YUNANI**

**RESUME SKRIPSI**



Oleh

Rizky Musafir

151 060 106

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

2011

Uni Eropa atau *European Union* yang merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supra-nasional adalah persatuan yang didirikan dibawah perjanjian Uni Eropa (dikenal dengan Perjanjian *Maastricht* pada tahun 1992. Salah satu isu utama dalam negara anggota Uni Eropa adalah permasalahan krisis ekonomi-politis di Yunani. Permasalahan ini sangat mempengaruhi negara-negara lain di Uni Eropa, karena disebabkan oleh hubungan antar negara anggota Uni Eropa yang terikat oleh mata uang Euro. Dibalik keberhasilannya, Uni Eropa tak lepas dari kritik permasalahan internal yang dihadapinya, misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi seperti yang diharapkan sebelumnya, peningkatan penduduk berusia lanjut dan imigran, serta penolakan konstitusi oleh masyarakat Perancis dan Belanda.

Dewasa ini muncul isu krisis ekonomi global yang dihadapi dunia yang kemudian ternyata sangat mengancam Eropa. Sebagai hasilnya Para pemimpin Eropa mengadakan pertemuan di Berlin Jerman untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi global. Meski pada dasarnya krisis keuangan global yang goncangannya berasal dari Amerika Serikat terjadi karena ekonomi pasar yang sangat liberal,

para pemimpin Eropa menolak ekonomi pasar sebagai penyebab fundamental krisis ini. Pertemuan Berlin ini merupakan pendahuluan pertemuan G-20 di London 2 April 2009. Agenda G-20 di London bertujuan untuk menulis kembali peraturan sistem keuangan global. Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy mengatakan para peserta dalam pertemuan London akan memikul tanggung jawab sejarah untuk mereformasi sistem global. Menurut Sarkozy jika pertemuan gagal menghasilkan jalan keluar maka tidak akan ada jaring keselamatan.

Salah satu isu utama dalam negara-negara anggota Uni Eropa adalah permasalahan krisis ekonomi dan politik di Yunani. Permasalahan utama Yunani adalah beban hutang negara yang diperkirakan mencapai 123,3% dari produk domestik kotor (atau *GDP, Gross Domestic Product*), yang jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain di seluruh dunia.

Beragam demonstrasi dan kekacauan di Yunani yang ditujukan pada pemerintah, membuat negara-negara anggota Uni Eropa ragu berhubungan dengan Yunani karena atas dasar ketidakpercayaan keamanan yang bersifat politis maupun ekonomis. Problematika Yunani terhadap negara-

negara anggota Uni Eropa yang lain terletak pada ketergantungan semua negara Uni Eropa ini pada mata uang Euro. Yunani tidak dapat dengan mudah mengambil keputusan sepihak, karena harus melibatkan negara-negara lain karena hubungan politis sebagai sesama anggota Uni Eropa yang terikat oleh perjanjian keanggotaan, dan secara ekonomis karena memiliki mata uang yang sama, yaitu Euro. Sebagai akibatnya, krisis di Yunani ini memaksa Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF) membantu dengan dana penyelamatan atau *recovery* sebesar 110 miliar euro.

Isu mengenai krisis ekonomi global dan pada akhirnya permasalahan krisis ekonomi di Yunani sebagai salah satu anggota Uni bersifat Internasional, karena dilakukan untuk dunia Internasional pula, terutama negara-negara yang tergabung sebagai anggota Uni Eropa. Permasalahan utamanya juga adalah bahwa permasalahan ekonomi ini menyangkut kebijakan politis pula.

Sebagai hasilnya muncul pengumuman Menteri Keuangan Uni Eropa yang akan menerapkan kebijakan spesifik untuk menyelamatkan Yunani. Komisaris Urusan Ekonomi dan Moneter UE Olli Rehn memastikan adanya upaya untuk menstabilkan kawasan. Ia mengatakan "Padahal, defisit

anggaran Yunani per 2009 telah mencapai 7,5% yang sebenarnya membutuhkan tindakan cepat dan konkrit." Namun kepala ekonom Eropa di Fortis Bank Netherland NV, Nick Kounis menjelaskan bahwa kebijakan keuangan akan baik bila ada dorongan politis yang sama baiknya. Ada beberapa peranan Uni Eropa dalam menanggulangi permasalahan krisis Yunani dan dukungan *recovery*nya.

Hanya saja pada prakteknya, bantuan Uni Eropa kepada Yunani mengalami beragam kendala. Pada dasarnya ada dua hambatan bantuan Uni Eropa kepada Yunani. Pertama, dalam hal jumlah bantuan serta prasyarat yang diajukan kepada Yunani, dan kedua adalah penundaan bantuan negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri, terutama Jerman dan Perancis sebagai dua negara terbesar di Uni Eropa yang memang sengaja menunda pencairan dana bantuan ke Yunani.

Skripsi ini kemudian menganalisis mengenai faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam bantuan ekonomi dan politik Uni Eropa ke Yunani. Penulis menggunakan teori politik dari Weber dan mengenai kebijakan publik William Dunn. Dalam ilmu Hubungan Internasional, sebuah teori mengenai politik luar negeri sangatlah penting sebagai dasar dan arah sebuah analisis. Ini dinyatakan oleh Weber

mengenai politik luar negeri bahwa politik internasional dapat mencakup banyak bidang, dari perang ke revolusi sampai masalah gender, hak asasi manusia dan perdagangan bebas. Lebih jauh, mengenai teori itu sendiri, Weber kembali menjelaskan bahwa bagaimana cara kerja sebuah teori hubungan internasional sebagai teori yang tidak hanya menggambarkan atau menceritakan keadaan politik internasional, namun juga menekankan pandangan dari teori tersebut mengenai keadaan dunia dimana politik internasional itu terjadi.

Di dalam analisis ini, penulis menggali teori-teori atau hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian dan melakukan perbandingan dengan teori atau hasil penelitian tersebut. Pada dasarnya penulis menggunakan pendekatan mengenai efektivitas. Dalam hal ini efektivitas yang dimaksud adalah mengenai efektivitas dalam pengambilan keputusan dari otoritas atau organisasi tertentu. Pendekatan mengenai teori efektivitas kebijakan ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai efektivitas dari sebuah kebijakan yang diambil oleh organisasi atau otoritas tertentu yang ditujukan bagi anggota organisasi atau subyek tertentu.

Dalam teori efektifitas kebijakan, dijelaskan mengenai bagaimana sebuah kebijakan diambil dan bagaimana mengukur efektivitas kebijakan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk merujuk pada teori kebijakan publik. Lebih jauh, William Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai pilihan tindakan saling berkaitan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat pemerintah dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kriminalitas, serta masalah lain yang menjadi urusan pemerintah. Secara sederhana, Dunn juga menjelaskan bahwa kajian utama kepemimpinan pemerintahan sebuah negara adalah kebijakan pemerintahan atau *public policy*. Sedangkan kebijakan itu sendiri dijelaskan sebagai apapun yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan.

Kebijakan publik atau kebijakan pemerintah ini dapat menciptakan sesuatu dan dapat pula diciptakan oleh sesuatu. Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena *public policy* merupakan *decision making* (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah).

Pada dasarnya, Dunn menjelaskan berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Dunn lebih jauh kemudian menjelaskan mengenai proses analisis kebijakan, yaitu bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap atau fase yang saling tergantung, atau disebut juga sebagai *policy cycle* (siklus kebijakan), yaitu terdiri atas:

1. **Penyusunan agenda** (*agenda-setting*)
2. **Formulasi kebijakan** (*the policy formulation*)
3. **Adopsi kebijakan** (*adoption of a legislative programme*)
4. **Implementasi kebijakan** (*implementation phase*), dan
5. **Penilaian kebijakan** (*evaluation phase*)



*Penyusunan agenda* berhubungan dengan pertimbangan aktor-aktor kunci sistem pemerintahan politik. Ini dapat dianggap sebagai sebuah mekanisme menyaring masalah-masalah dari aktor-aktor publik.

Pada *formulasi kebijakan* terdapat pemilihan tujuan, instrumen dan prosedur untuk diimplementasikan pada kebijakan. Proses formulasi kebijakannya dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian Persoalan: Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
2. Penentuan Tujuan: Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
3. Perumusan Alternatif: Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Penyusunan Model: Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model

matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.

5. **Penentuan kriteria:** Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
6. **Penilaian Alternatif:** Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
7. **Perumusan Rekomendasi:** Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

*Fase implementasi* terdiri dari *adaptasi* program kebijakan pada situasi konkret yang dihadapi. Sedangkan tahap *evaluasi* dianggap sebagai elemen konstituen sebuah kebijakan, bertujuan menentukan hasil dan dampak-dampak

sebuah kebijakan dalam artian perubahan-perubahan dalam perilaku kelompok-kelompok target (dampak) dan resolusi masalah (hasil/*outcome*)

Bila dihubungkan dengan keberadaan Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional, dapat dijelaskan bahwa efektivitas kebijakan Uni Eropa haruslah diukur dari proses pembuatan kebijakan Uni Eropa sebagai sebuah institusi politik internasional dalam usaha pemberian bantuan kepada Yunani sebagai salah satu negara anggotanya, baik melalui penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakannya. Keefektivitasan kebijakan Uni Eropa dalam kasus Yunani ini juga nantinya dilihat dari lima siklus kebijakannya (*policy cycle*) tersebut. Bagaimana perjalanan pelaksanaan atau kebijakan Uni Eropa, dalam hal ini secara khusus adalah apakah terjadi kendala dan seberapa besar kendala tersebut dalam pelaksanaannya. Ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas kebijakan bantuan Uni Eropa dalam pelaksanaannya sesuai dengan teori kebijakan publik Dunn.

Oleh sebab itu, dengan adanya kasus Yunani dan penanganannya oleh Uni Eropa, dapat dijelaskan bahwa

bantuan Uni Eropa dalam usaha perbaikan ekonomi politik Yunani dianggap tidak efektif dilihat dari *formulasi* dan *implementasi* kebijakan. Dari siklus *formulasi* kebijakan mengenai bantuan Uni Eropa dengan pemberian dana yang salah satunya diambil dari IMF ternyata tidak efektif karena mendapatkan pertentangan dari anggota Uni Eropa serta masyarakat Yunani sendiri yang notabene adalah negara yang ingin dibantu. Pada *implementasi* kebijakan Uni Eropa juga ternyata tidak efektif karena mendapatkan beragam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari penolakan masyarakat dalam negeri Jerman dan Prancis sebagai dua negara besar yang memberikan sumbangsih kepada Yunani. Selain itu, di Jerman dan Prancis sendiri terdapat hambatan di dalam negeri dengan kebijakan penundaan bantuan kepada Yunani. Ini berarti bahwa kebijakan yang diterapkan Uni Eropa terbukti tidak efektif, begitu juga dengan kebijakan yang dijalankan oleh Uni Eropa, dimana terjadi beragam kendala dari dalam Uni Eropa itu sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pada dasarnya argumen dasar yang dapat diambil dalam analisis ini adalah bahwa strategi dan kebijakan Uni

Eropa tidak efektif dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada Yunani dari tahap formulasi dan implementasi kebijakan dari lima siklus kebijakan William Dunn. Sebagai akibatnya, terdapat hambatan Uni Eropa dalam usaha perbaikan ekonomi politik di Yunani karena ketidakefektifan Uni Eropa sebagai salah satu lembaga internasional. Faktor-faktor penghambat tersebut tentu saja ditilik dari siklus kebijakan, yaitu:

- a. Dari siklus *formulasi* kebijakan, dimana Uni Eropa memformulasikan kebijakan dengan bantuan dari IMF. Disinilah terdapat faktor penghambat yang berasal dari dalam Uni Eropa, dimana terjadi penolakan pada bantuan yang diberikan oleh IMF.
- b. Dari siklus *implementasi* kebijakan terjadi penundaan bantuan oleh Prancis dan Jerman sebagai dua negara besar anggota Uni Eropa kepada Yunani serta aksi demonstrasi dan penolakan di dalam negeri Yunani oleh mahasiswa dan masyarakat atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, seperti memangkas gaji dan fasilitas buruh serta menaikkan pajak.

Yunani adalah sebuah negara berkembang dengan standar kehidupan yang tinggi. Industri-industri utama Yunani adalah pariwisata, perkapalan, produk industri, pemrosesan makanan dan tembakau, tekstil, kimia, produk baja, pertambangan dan perminyakan. Pertumbuhan GDP , rata-rata, sejak tahun 1990-an lebih tinggi daripada rata-rata anggota Uni Eropa. Namun, ekonomi Yunani juga menghadapi masalah-masalah yang signifikan, termasuk naiknya tingkat pengangguran, birokrasi yang tidak efisien, penghindaran dari pajak dan tentu saja korupsi. Yunani menderita dari korupsi ekonomi dan politik yang tinggi serta kompetisi global yang rendah bila dibandingkan dengan rekan-rekan Uni Eropa lainnya. Bergabungnya Yunani dalam Komunitas Eropa sebenarnya diharapkan dapat membantu perekonomian Yunani melalui pasar bersama, namun Yunani kesulitan beradaptasi dengan kompetisi pasar karena industri di Eropa Utara sudah lebih maju dan mapan. Akibatnya, terjadi penurunan GNP per kapita yakni dari 58 % GNP per kapita rata-rata ME di tahun 1980, menjadi 52 % pada tahun 1991. Antara tahun

1980-1990-an, Yunani memiliki hutang yang besar terkait dengan defisit anggaran.

Bila ditilik Yunani menjadi adalah satu-satunya anggota Komunitas Eropa yang ingin menjadi bagian dari Perjanjian *Maastricht* namun tidak dapat memenuhi kriteria atau syarat menjadi anggota Uni Eropa dikarenakan oleh inflasi, defisit anggaran, hutang, dan suku bunga yang tinggi. Kemudian Yunani berusaha memperbaiki perekonomiannya dengan program penghematan dan usaha ini membuahkan hasil positif. Yunani akhirnya dapat memenuhi kriteria : inflasi 2,1%, defisit anggaran 1,7% dari GDP, dibawah 3% ketentuan Perjanjian *Maastricht* dan resmi tahun 2001 Yunani dapat bergabung dengan Uni Eropa.

Namun kemudian, pada akhir tahun 2009, sebagai sebuah hasil dari faktor ekonomi-politik internasional (krisis finansial) dan lokal (pengeluaran yang tidak terkontrol untuk pemilihan umum nasional pada bulan Oktober 2009), ekonomi Yunani menghadapi krisis yang paling berat sejak tahun 1993. Ini ditambah dengan meningkatnya hutang yang menyebabkan krisis ekonomi yang parah. Permasalahan politik juga ikut ambil bagian dalam permasalahan ekonomi ini. Seperti yang telah dijelaskan

diatas, banyak masyarakat yang menghindari untuk membayar pajak dianggap merupakan kegagalan pemerintahan Sosialis yang terpilih bulan Oktober 2009. Tuduhan ini dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang meragukan kredibilitas pemerintahan baru ini.

Pada minggu-minggu pertama tahun 2010, ada kekhawatiran yang kembali muncul mengenai hutang nasional yang berlebihan. Kekhawatiran ini berdasar pada kemungkinan negara-negara lain tertular krisis ekonomi yang terjadi di Yunani, seperti Spanyol dan Italia yang mulai menghadapi masalah finansial.

Inilah yang kemudian memunculkan permasalahan yang berentetan dengan negara-negara Uni Eropa lain karena keterikatan secara politis maupun ekonomis. Penyebab krisis keuangan Yunani ini pada dasarnya dipicu oleh keengganan atau keraguan pasar dunia untuk menyerap Surat Utang Negara (SUN) Yunani agar Yunani dapat memenuhi pembayaran utangnya sebesar 20 milyar Euro pada bulan April-Mei 2010. Karena tidak ada dukungan terhadap SUN tersebut, maka dimungkinkan Yunani tidak akan dapat membayar utang tersebut. Akibatnya jelas negara-negara lain akan hilang kepercayaannya, terutama negara-negara



Uni Eropa, yang dalam hal ini dikaitkan dengan adanya penundaan bantuan oleh dua negara utama Uni Eropa yaitu Jerman dan Prancis. Sedangkan penyebab krisis defisit anggaran Yunani adalah lemahnya disiplin anggaran serta buruknya perpajakan di negara tersebut yang tercermin dari pemborosan, korupsi, maupun manipulasi pembukuan.

Yunani mengalami pola hutang untuk menyelamatkan hutang swasta, sehingga negara terus berhutang. Masalah hutang ini kemudian sudah tidak dapat ditolong lagi dan menyebabkan Yunani mengambil kebijakan-kebijakan yang memicu penolakan dari dalam negeri berupa demonstrasi besar-besaran dari para mahasiswa dan pekerja, bahkan masyarakat awam. Pada bulan Februari 2010, sekitar 25.000 orang ramai-ramai mogok kerja untuk berdemonstrasi di ibukota Yunani, Athena, dan sekitar 7 ribu orang lagi di Thessaloniki, kota terbesar kedua di Yunani. Ini merupakan aksi mogok nasional yang dipimpin oleh Serikat Pekerja Swasta GSEE untuk meminta pemerintah membatalkan kebijakan dan tindakannya.

Menilik masalah yang dihadapi Yunani seperti yang dijelaskan diatas, langkah konkrit Uni Eropa untuk menyelamatkan Yunani dari masalah anggaran sangatlah

diperlukan. Karena bila tidak segera dilakukan bantuan tersebut, akibatnya sangat fatal, yaitu dapat meruntuhkan kepercayaan para investor. Uni Eropa memiliki tugas yang cukup berat, dimana pejabat kawasan ini harus bisa meyakinkan pasar atas pemecahan masalah defisit anggaran Yunani, karena jika gagal mencari solusi, atau masalah meningkat, bukan tak mungkin pemodal akan lari ke pasar lain. Kondisi ini dapat menyebabkan tergantikannya posisi Uni Eropa sebagai kawasan yang tertib fiskal. Uni Eropa harus segera menerapkan sejumlah aturan dan menjaga kestabilan instrumen dan lembaga-lembaga mereka, agar krisis tidak menyebar ke wilayah lain di dunia. Kemampuan Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah ini juga merupakan tanggung jawab Uni Eropa itu sendiri sebagai sebuah organisasi internasional yang terdiri beragam anggota dari beragam negara. Bagaimanapun juga, Uni Eropa berhak memberikan sanksi seperti yang pertama kali dilontarkan beberapa negara anggota Uni Eropa ketika menghadapi masalah Yunani.

Mengenai Uni Eropa, diputuskan akhirnya muncul pengumuman Menteri Keuangan Uni Eropa yang akan menerapkan kebijakan spesifik untuk menyelamatkan Yunani,

bukan sanksi. Demikian juga Komisaris Urusan Ekonomi dan Moneter UE Olli Rehn yang memastikan adanya upaya untuk menstabilkan kawasan. Ia mengatakan "Padahal, defisit anggaran Yunani per 2009 telah mencapai 7,5% yang sebenarnya membutuhkan tindakan cepat dan konkrit." Namun kepala ekonom Eropa di Fortis Bank Netherland NV, Nick Kounis menjelaskan bahwa kebijakan keuangan akan baik bila ada dorongan politis yang sama baiknya. Ada beberapa peranan Uni Eropa dalam menanggulangi permasalahan krisis Yunani dan dukungan *recovery*nya.

Selain tindakan yang bersifat ekonomis, Uni Eropa juga diharapkan dapat melakukan peran-peran politis.

Selama berbulan-bulan Yunani tersiksa dan terancam ke ujung krisis ekonomi. Karena adanya ancaman-ancaman bahwa pasar mungkin mendorong masyarakat Yunani ke dalam kebangkrutanlah yang mendorong negara-negara Uni Eropa, terutama yang kuat secara ekonomi dan politik seperti Jerman dan Prancis, untuk secara serius mengumpulkan sebuah paket *bailout* yang nyata berjumlah sekitar 30 miliar Euro. Dengan demikian, negara-negara itu bukan hanya memberikan Yunani sebuah kesempatan untuk tetap bertahan, tapi juga dapat menstabilkan Euro yang melemah

dan setidaknya untuk saat ini mencegah Uni Eropa sendiri dari ketegangan-ketegangan politik internal yang merusak.

Bantuan khususnya finansial oleh Uni Eropa kepada Yunani menghadapi hambatan. Pada dasarnya ada dua hambatan dari negara-negara Uni Eropa itu sendiri, pertama mengenai penolakan campur tangan IMF dan penundaan bantuan oleh Jerman dan Prancis.

Mengenai kedua hal ini, bila diselaraskan dengan teori kebijakan publik Dunn, yaitu mengenai proses kebijakan yang terdiri atas:

1. Penyusunan agenda (*agenda-setting*)
2. Formulasi kebijakan (*the policy formulation*)
3. Adopsi kebijakan (*adoption of a legislative programme*)
4. Implementasi kebijakan (*implementation phase*), dan
5. Penilaian kebijakan (*evaluation phase*).

Dapatlah dilihat bahwa dari *formulasi* kebijakan dan *implementasi* kebijakan mengalami permasalahan. Pada *formulasi* kebijakan, beberapa negara seperti Jerman dan Prancis pada awalnya menolak untuk memberikan bantuan

pada Yunani, malahan agenda yang disarankan pada awalnya adalah sanksi bagi Yunani karena tidak dapat mengatur keuangan negaranya yang pada akibatnya menimbulkan kekacauan dan pengaruh buruk bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang lain. Dalam *formulasi* dan *adopsi* kebijakan juga terjadi masalah dan hambatan yaitu ketika di dalam Uni Eropa sendiri terjadi penolakan campur tangan IMF. Negara-negara anggota kemudian memutuskan untuk membantu Yunani tetapi dengan prasyarat yang harus Yunani terima, terapkan dan laksanakan di dalam negeri.

*Formulasi* kebijakan mengalami kesulitan karena Jerman dan Prancis memutuskan untuk menunda bantuan beberapa kali karena menganggap Yunani belum memenuhi prasyarat yang diajukan. Selain itu tentu saja *implementasi* kebijakan prasyarat dalam negeri Yunani mendapat tentangan dari masyarakat yang terdiri dari mahasiswa dan para pekerja.

Untuk melihat penilaian kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Uni Eropa itu sendiri masih belum dapat dilakukan mengingat *implementasi* kebijakan belum selesai dilaksanakan dan masalah belum terselesaikan.

Terdapat sedikit masalah politis dalam usaha bantuan yang datang dari Jerman dan Prancis sebagai dua negara utama Uni Eropa. Jerman sendiri merupakan sebuah negara yang begitu ketat dalam masalah keuangan, maka Jerman cukup menentang masuknya IMF ke dalam Uni Eropa. Karena ini dimungkinkan membuat nama Uni Eropa tercoret karena dianggap tidak mampu mengatur keuangan mereka. Jerman dianggap menentang usaha Eropa untuk membantunya keluar dari krisis keuangan dengan bantuan IMF yang pada akhirnya dapat mengguncang kestabilan blok Uni Eropa dari dalam. Jerman dianggap melupakan pentingnya politik Eropa dan tidak mempertimbangkan substansi sebenarnya dari visi politik Eropa bersama yaitu usaha untuk mengembangkan perekonomian yang tenang dan iklim yang stabil.

Dalam permasalahan pada tahap formulasi berikutnya berhubungan dengan dana bantuan kepada Yunani dimana terjadi kendala kepercayaan dari Uni Eropa terutama Jerman dan Prancis. Syarat-syarat yang diberikan Uni Eropa harus sangat dipatuhi oleh Yunani bila ingin mendapatkan bantuan penuh.

Selain itu, penundaan bantuan Jerman khususnya dikarenakan dari dalam negeri Jerman sendiri menghadapi

tekanan karena rendahnya inflasi dalam negeri. Ini disebabkan karena Jerman merupakan negara anggota Uni Eropa yang paling besar memberikan bantuan penyelamatan bagi Yunani sebesar 110 miliar Euro dan 67,5 miliar Euro.

Tidak seperti Prancis, Jerman memang pada awalnya menolak bantuan apapun untuk Yunani, malahan agenda yang disarankan pada awalnya adalah sanksi bagi Yunani karena tidak dapat mengatur keuangan negaranya yang pada akibatnya menimbulkan kekacauan dan pengaruh buruk bagi negara-negara anggota Uni Eropa yang lain. Jerman sejauh ini telah menghadang upaya negara-negara Eropa untuk mengusulkan sebuah program dana talangan, mengatakan bahwa Yunani tidak meminta bantuan, tidak berada di jurang kebangkrutan dan harus beralih ke IMF jika mencapai titik di mana negara itu tidak dapat meminjam dari pasar.

Krisis global yang melanda Eropa pada dasarnya juga merupakan rentetan peristiwa yang dimulai dari Amerika Serikat. Krisis ini dimulai sejak tahun 2008 setelah runtuhnya perbankan investasi raksasa Lehman Brothers.

Para pemimpin Eropa mengadakan pertemuan di Berlin Jerman untuk menyelesaikan masalah krisis global. Dalam

hasil pertemuan disepakati perlunya regulasi semua pasar uang termasuk *hedge funds*. Meski pada dasarnya krisis keuangan global yang goncangannya berasal dari Amerika Serikat terjadi karena ekonomi pasar yang sangat liberal, para pemimpin Eropa menolak ekonomi pasar sebagai penyebab fundamental krisis ini. Untuk memproteksi pandangan dunia dari kesalahan ekonomi pasar, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown memperingatkan akan melawan setiap usaha untuk kembali kepada **proteksionisme** meskipun dengan alasan menghadapi perekonomian yang sulit. Pertemuan Berlin ini merupakan pendahuluan pertemuan G-20 di London 2 April 2009. Agenda G-20 di London bertujuan untuk menulis kembali peraturan sistem keuangan global. Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy mengatakan para peserta dalam pertemuan London akan memikul tanggung jawab sejarah untuk mereformasi sistem global. Menurut Sarkozy jika pertemuan gagal menghasilkan jalan keluar maka tidak akan ada jaring keselamatan. Pertemuan demi pertemuan yang dilakukan para pemimpin Eropa tidak memberikan hasil untuk membangun kembali sistem keuangan yang hancur kecuali paket-paket stimulus ekonomi. Paket-paket ini justru menambah beban keuangan negara dan hutang rakyat.



Jelas sekali para pemimpin Eropa "kebingungan" mencari jalan keluar bagi negara mereka.

Krisis keuangan yang melanda dunia khususnya di negara-negara Barat telah bermetamorfosis dari krisis keuangan semata menjadi krisis sistem keuangan Kapitalisme. Tentu saja sebagai akibatnya Uni Eropa kebingungan dalam menghadapi krisis global yang melanda Eropa termasuk negara-negara anggotanya. Pada akhirnya Uni Eropa harus mengadakan beragam formula kebijakan dalam menangani masalah Yunani dan pemberian bantuan terhadap Yunani itu sendiri. Bantuan kepada Yunani itu sendiri juga sangat penting mengingat negara-negara lain akan terimbas efeknya bila Yunani menghadapi permasalahan, misalnya saja Spanyol dan Portugal. Itu pula yang menyebabkan bantuan IMF menjadi pertimbangan walau telah sempat mendapatkan pertentangan.

Sedangkan dari dalam negeri Yunani sendiri juga terjadi hambatan. Pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels pada bulan Mei 2010 membuahkan hasil. Secara ekonomi dan politis, Uni Eropa berkomitmen untuk menghadapi para spekulasi di pasar keuangan saat mereka memproses kesepakatan senilai 600 milyar Euro untuk

menjaga krisis utang Yunani agar tidak menyebar ke negara-negara Uni Eropa lain. Pembicaraan di Brussels ini mengenai *loan guarantee* atau tanggungan hutang untuk pinjaman dari negara-negara zona Euro senilai 440 milyar Euro berasal dari *stabilization fund* atau dana stabilisasi dan 100 milyar Euro dari pinjaman Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Uni Eropa berharap *bailout* atau bantuan tanggungan ini berhasil menangani krisis. IMF sendiri telah menyetujui pinjaman 30 milyar Euro, sehingga total dana yang dikumpulkan untuk *bailout* Yunani mencapai 110 milyar Euro.

Untuk mengamankan dana tersebut, Yunani telah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah politis seperti pemotongan anggaran belanja negara. Seperti diketahui, anggaran belanja negara inilah yang telah menyebabkan terjadi demonstrasi yang memakan banyak korban jiwa.

Keputusan pemerintah Yunani tersebut ditekankan oleh pendapat seorang kolumnis New York Times sekaligus seorang ekonom yang meraih hadiah Nobel yang mengatakan bahwa pemerintah Yunani perlu melaksanakan kebijakan

ekonomi politik yang tegas seperti menekan ekonomi domestik, memangkas gaji dan fasilitas buruh secara signifikan, menaikkan pajak, dan menuntut masyarakat lebih hemat lagi. Kebijakan semacam ini perlu diterapkan selama bertahun-tahun. Meski tentu saja pada kenyataannya, kebijakan ini akan menghadapi tantangan dan masalah politis serius di dalam negeri seperti penentangan dari kalangan buruh dan pegawai serta aksi kerusuhan yang kini mulai menyebar luas.

Diberitakan pula bahwa KTT Uni Eropa mengharuskan Yunani melakukan langkah-langkah konkrit untuk penghematan anggaran secara drastis. Berikut ini adalah beberapa langkah penghematan anggaran yang dilakukan oleh Yunani:

- Anggota parlemen Yunani telah menyetujui RUU reformasi dana pensiun yang meningkatkan usia pensiun dan membatasi pensiun dini, elemen kunci dari bailout Uni Eropa/IMF yang bertujuan menarik negara ini keluar dari krisis utang.
- Yunani berencana untuk mempersempit defisit anggaran dari 13,6% dari PDB pada 2009 menjadi 8,1% tahun ini, 7,6% pada tahun 2011 dan 2,6% pada 2014.

- Upah sektor publik dipotong rata-rata sebesar 15% pada tahun 2010 dan akan dibekukan (tidak mengalami kenaikan) sampai dengan tahun 2014.
- Upah sektor swasta akan dibekukan untuk tahun ini dan akan meningkat sejalan dengan inflasi kawasan Eropa pada tahun 2011 dan 2012.
- Pensiun, baik dalam sektor publik dan swasta, dipotong sebesar 10% dan tidak akan mengalami perubahan pada tahun 2011 dan 2012. Usia pensiun untuk wanita diangkat sebanyak 5 tahun ke 65 tahun untuk menyamai usia pension pria dan jumlah tahun kontribusi naik dari 35-37 menjadi 40 tahun.
- Tingkat PPN utama meningkat sebesar 4 poin persentase menjadi 23%. pajak konsumsi lainnya, termasuk pajak cukai bahan bakar, rokok dan alkohol ditingkatkan rata-rata sebesar 30%. Akibatnya, harga eceran gas di SPBU naik sekitar 50% sejak awal tahun.

Mengenai bantuan terhadap Yunani ini, tentu saja ada prasyarat yang harus terlebih dahulu dipenuhi oleh Yunani dari Uni Eropa. Dana pinjaman IMF yang kemudian akhirnya disetujui oleh Uni Eropapun sebenarnya tidak dapat

langsung dicairkan, karena sama dengan Uni Eropa, IMF juga memberikan prasyarat yang harus dipenuhi oleh Yunani. Sedangkan, ketika kebijakan tersebut dilaksanakan, pemerintah Yunani pun sebenarnya masih diragukan oleh Uni Eropa dan IMF sebagai pemberi bantuan. Ini dikarenakan perilaku buruk pemerintahan, termasuk korupsi dan hutang yang berkepanjangan oleh pemerintah, pengusaha dan pejabat terkait.

Beragam demonstrasi besar-besaran seringkali diadakan oleh mahasiswa atau masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan dan kebijakan yang diterapkan pemerintah Yunani untuk menanggulangi krisis dalam negeri tersebut. Parlemen Yunani meluluskan usulan pemerintah untuk memangkas pengeluaran sekaligus menaikkan pajak agar mendapat bantuan keuangan dari IMF dan Uni Eropa. Namun, keputusan parlemen itu mengundang amarah sebagian rakyat dengan berunjuk rasa di Ibukota Athena. Bantuan keuangan itu disertai syarat yaitu dimana Yunani harus melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran disertai kenaikan pajak. Bantuan darurat itu sangat penting bagi Yunani agar terhindar dari kebangkrutan dan tidak sampai gagal bayar utang. Keputusan Yunani itu mengundang

kemarahan sebagian rakyat yang menilai rakyatlah yang harus menanggung beban krisis itu saat melihat pajak harus naik dan gaji bagi pegawai negeri dikurangi sebagai bagian dari pengurangan anggaran, hanya untuk bantuan yang tidak seberapa besar.

Masyarakat dan buruh menentang kebijakan yang diambil oleh negara, dimana negara terpaksa memotong beragam fasilitas para pekerja ekonomi dan mencampuri proses ekonomi masyarakat karena tanggungan utang yang begitu besar. Keputusan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan pada kenyataannya banyak ditentang oleh kaum buruh dan masyarakat yang merasa negara bersifat tidak adil, korup, dan menyengsarakan rakyat. Selain itu, masyarakat juga menentang program penghematan pemerintah dan pinjaman dana dari Uni Eropa dan IMF yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Papandreou.

Sebagai akibatnya, bantuan dari Uni Eropa dan IMF mendapatkan hambatan yang cukup besar dari dalam negeri Yunani sendiri, yaitu dari masyarakat. Dapat disimpulkan alasan penolakan masyarakat adalah bahwa syarat yang diberikan oleh Uni Eropa dan IMF dirasa sangat

memberatkan masyarakat. Masyarakat dipaksa untuk membayar hutang-hutang negara dengan beragam pemotongan dan penghematan, padahal rakyat sudah sengsara.